

ANALISIS PRAKTIK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MELALUI PENERAPAN MOBILE BANKING

**Oleh : Vicky Yuwandy
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Ibn Khaldun Bogor**

ABSTRACT

Poverty is a huge danger to humanity and not a few people who fall into civilization are only due to poverty. Poverty reduction efforts continue to be promoted one of them by empowering groups with the development of Microfinance. A country with a Muslim majority like Indonesia, initiatives have been taken to implement Islamic microfinance institutions. One way to measure the financial performance of Islamic microfinance institutions is to look at the implementation of the Accounting Information System (AIS) in loan disbursement and loan repayment. To achieve maximum service performance, innovations such as the use of mobile banking are needed. Based on the above reasons, this study aims to determine the use of information technology in improving the quality of financial reporting on Micro Small and medium enterprises (MSMEs), and the practice of using e-services in facilitating accounting information systems for MSMEs using the services of Islamic Micro Finance in Bogor.

This study uses quantitative methods. Data collection techniques using questionnaires, while data analysis techniques using multiple linear regression analysis with the help of SPSS 16. The results of the analysis show that the Accounting Information System has a significant effect on MSME actors facilitated by LKMS in Bogor Regency for financial reporting. On the results of simultaneous testing or F test shows the variable mobile banking has a significant positive effect on the accounting information system and research shows that most respondents use information technology to support their productivity.

Keywords: *Accounting Information System, Islamic microfinance institutions, m-banking*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia pasca krisis tahun 1997 terus mengalami pertumbuhan yang berdampak juga pada penurunan kemiskinan. Tren kemiskinan bergeser dari angka 24% pada tahun 1999 menjadi 11,4% pada awal 2003. Akan tetapi penurunan kemiskinan sejak tahun 2013 mengalami kelambatan pada kisaran 0,5% tiap tahun. Data survei Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 %), berkurang sebesar 1,19 juta orang

dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 %).

Indonesia telah berusaha keras untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan seperti yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan. Data survei Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 %), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 %). Penelitian tentang kemiskinan dan pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial, jaminan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan program berbasis masyarakat semakin marak pada beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia terkait kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan Keuangan Mikro, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan tentang peran tanggung jawab sosial dalam pengentasan kemiskinan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Bentuk tanggung jawab bagi lembaga keuangan adalah memperluas jangkauan pinjaman sampai ke daerah pelosok yang mayoritas penduduknya miskin, tanpa agunan, biaya pinjaman yang kecil, dan menggunakan birokrasi yang sederhana. (Abdul Rahman 2013). Dengan membiayai bisnis orang miskin maka orang miskin akan mandiri dan mereka menyadari bahwa mereka perlu bekerja untuk mendapatkan uang.

Negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, inisiatif telah dilakukan untuk menerapkan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah telah dibentuk untuk menyediakan *Qard Hasan* dalam mempromosikan kegiatan perdagangan dalam hal pengembangan kewiraswastaan di kalangan peminjam keuangan mikro. Potensi keuangan mikro syariah sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan juga mempromosikan suatu negara. Salah satu cara mengukur kinerja keuangan lembaga keuangan mikro syariah adalah dengan melihat pada implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pencairan pinjaman dan pengembalian pinjaman (Kauffman dan Riggins, 2012; Weber, 2012). Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi untuk lembaga keuangan mikro syariah tidak terbantahkan dan telah terpapar melalui beberapa karya penelitian. Diantaranya karya penelitian terbaru tentang Sistem Informasi Akuntansi tentang Sistem Informasi Akuntansi pada konferensi tahunan di Roma Italia. Umumnya, penelitian Sistem Informasi Akuntansi mencakup desain, penerimaan dan ketergantungan, nilai tambah, pengambilan keputusan, hubungan antar organisasi, dan perbaikan proses.

Meskipun sistem informasi akuntansi sering dianggap sebagai instrumen secara *default* untuk otomatisasi akuntansi, kemampuannya dalam mencampur unsur-unsur yang saling terkait yaitu data, informasi, sumber daya manusia, alat teknologi informasi, model akuntansi, dan prosedur, telah difasilitasi untuk mencapai tujuan akuntansi yang pada dasarnya melibatkan pengumpulan, pengklasifikasian, penjabaran, pencatatan, dan penyimpanan data akuntansi. Oleh karena itu, tak dapat dipungkiri bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah alat strategis yang ampuh untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pertumbuhan ekonomi harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, Untuk mencapai kinerja layanan yang maksimal perlu dilakukan inovasi yang berbasis pada teknologi terkini seperti penggunaan *internet banking*, dan *mobile banking* tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia saat ini didorong oleh apa yang disebut gaya hidup instan, dan dalam dunia keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan mikro, layanan *mobile banking* adalah salah satu cara *instan modern*. Era globalisasi datang begitu cepat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi yang demikian pesat telah mentransformasi aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Beragamnya aktivitas manusia menyadarkan mereka akan pentingnya kehadiran teknologi yang memaksa mereka untuk selalu bertindak dengan cepat, praktis, efektif, efisien, terutama dalam bertransaksi. Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa urgensi peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, di karenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro, mampu menggerakkan dan menopang pemulihan perekonomian nasional bahkan dalam ekonomi keluarga.

Demikian juga alat sebagai penopang mencampur unsur-unsur yang saling terkait yaitu data, informasi, sumber daya manusia, alat teknologi informasi, model akuntansi, dan prosedur, telah difasilitasi untuk mencapai tujuan akuntansi yang pada dasarnya melibatkan pengumpulan, pengklasifikasian, penjabaran, pencatatan, dan penyimpanan data akuntansi. Penerapan *mobile banking* akan menyediakan infrastruktur untuk menilai penerima pinjaman keuangan mikro yang biasanya memiliki segmen populasi yang tidak beruntung dan tidak terlayani. Penggunaan *mobile banking* tidak hanya terbatas pada layanan pembayaran dan pengiriman uang seluler ke masyarakat, namun dapat diperluas untuk memfasilitasi produk dan layanan keuangan lainnya termasuk kredit, tabungan dan asuransi. Dengan demikian, keuangan mikro akan dilengkapi dengan sistem keuangan formal dan arus utama ekonomi yang akan mengubah mata pencaharian segmen masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui pemanfaatan teknologi informasi akuntansi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan pada UMKM yang mendapatkan layanan dari LKMS; kedua, mengetahui praktik pemanfaatan *e-service* dalam memfasilitasi sistem informasi akuntansi bagi UMKM yang menggunakan jasa LKMS di Kabupaten Bogor.

Tinjauan Pustaka

A. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Kata “Sistem” telah banyak digunakan dalam berbagai kesempatan, antara lain dalam percakapan sehari-hari, buku-buku, forum seminar atau diskusi, atau dokumen berbagai ilmiah. Kata sistem juga digunakan untuk menggambarkan banyak hal, seperti: sistem pendidikan, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem informasi dan sebagainya. Definisi lain menyebutkan sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul *Analisa dan Desain Sistem Informasi*, sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu, sedangkan informasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga hasil olahan tersebut telah bermanfaat bagi para pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi terdiri dari data yang telah di transformasi dan dibuat lebih bernilai melalui suatu proses. Informasi juga dapat diartikan sebagai hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Informasi membantu untuk mengetahui kondisi apapun baik yang terjadi dimasa lalu maupun dimasa kini bahkan mungkin yang akan terjadi dimasa mendatang. Informasi yang berkualitas akan terbentuk dari adanya sistem informasi (SI) yang dirancang dengan baik.

Menurut Tata Sutabri adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dalam dunia bisnis merupakan subyek penting dalam berbagai keputusan manajemen. Bagi seorang manajer, informasi sangat bermanfaat karena dapat membantu untuk mengetahui dan memahami prestasi kerja, disamping itu juga digunakan untuk menganalisis perubahan yang terjadi termasuk dalam pencatatan laporan keuangan atau secara akuntansi. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, 1953, dalam *Accounting Bulletin No.1* yang telah diterjemahkan. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan suatu cara tertentu, yang dinyatakan dalam uang, transaksi dan peristiwa, paling tidak mengenai karakter keuangan dan penafsiran hasil. Akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi ekonomi yang memungkinkan penilaian dan pengambilan keputusan oleh pengguna informasi.

Akuntansi juga dapat didefinisikan suatu proses identifikasi /pengenalan, pengukuran dan pelaporan ekonomi. Sistem Informasi (SI) terbagi menjadi dua. Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sistem Informasi Manajemen terdiri dari : Sistem Manajemen Keuangan, Sistem Distribusi, Sistem Pemasaran, dan Sistem Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari : Sistem Proses Transaksi, Sistem Buku Besar dan Laporan Keuangan, dan Sistem Laporan Manajemen. Sistem Informasi Akuntansi dapat membantu manajer dalam pengendalian aktivitas pada organisasinya sehingga sangat diharapkan akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan.

Fakta menunjukkan bahwa akuntansi keuangan merupakan sumber utama informasi bagi manajemen UMKM, Referensi tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi oleh UMKM sangatlah terbatas, padahal Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa UMKM memiliki keterbatasan informasi manajemen, kemampuan pengendalian yang rendah, dan pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan atas dasar *ad hoc*. Perren dan Grant (2000) melakukan studi kasus pada UMKM sektor Jasa di Inggris menyimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian ini lebih disebabkan oleh paradigma penelitian daripada pertentangan yang sebenarnya terjadi.

Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana persepsi UMKM tentang pentingnya informasi akuntansi khususnya informasi di luar cakupan sistem akuntansi keuangan. Perren dan Grant (2000) melakukan studi kasus pada UMKM sektor Jasa di Inggris menyimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian ini lebih disebabkan oleh paradigma penelitian daripada pertentangan yang sebenarnya terjadi. Maka itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana persepsi UMKM tentang pentingnya informasi akuntansi khususnya informasi di luar cakupan sistem akuntansi keuangan. Akuntansi itu sendiri harus dinamis tanpa meninggalkan karakteristik pelaporan keuangan. Sistem pengendalian strategis memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa organisasi berhasil meskipun lingkungannya berubah. Misalnya bahwa, SIA telah disiapkan untuk digunakan secara efektif untuk melayanitujuan ini. SIA merupakan mekanisme yang kritis digunakan dalam mendukungpengambilan keputusan yang efektif.

B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut SK Mengkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan membiayai investasi perusahaan. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melakukan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang cukup populer antara lain Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Waat Tamwil (BMT). Jumlah BPRS dan BMT mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Lembaga keuangan syariah selain memiliki fungsi sebagai pengelola investasi dan penyedia jasa-jasa keuangan juga memiliki fungsi sebagai penyedia jasa sosial. Lembaga keuangan mikro syariah juga menjadi salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi juga untuk menyimpan hasil usaha mereka. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sudah menjadi sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Lembaga keuangan mikro disamping sebagai lembaga keuangan yang profit oriented, juga berorientasi pada penanganan kemiskinan, merubah mental dan gaya hidup konsumtif masyarakat miskin menjadi gaya hidup yang berorientasi pada upaya-upaya produktif. Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), dan Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar. Dari bukti-bukti yang diperoleh, keuangan mikro syariah telah menunjukkan beberapa ciri di menyediakan system dukungan kepada masyarakat miskin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral dan sosial untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan untuk kemakmuran masyarakat (Alhuda CIBE, 2013). Dengan demikian, keuangan mikro syariah dipandang sebagai alat pembiayaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Beberapa jenis lembaga keuangan mikro syariah terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya BPRS, BMT, dan Koperasi Syariah. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil. UU No. 10 Tahun 1998 yang merubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi: Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. *Bait al-Mall wa at-Tamwil* (BMT) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai balai usaha terpadu. BMT merupakan gabungan dari *baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Secara etimologi *Baitul Mall* berarti rumah uang, sedangkan *Baitul Tamwil* adalah rumah pembiayaan.

Dalam konteks Islam, lembaga keuangan mikro kecil ini tampil dalam bentuk BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). BMT atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta

membela kepentingan kaum fakir miskin. Lembaga ini secara empiris telah menunjukkan fungsi dan peran penting dalam memerangi kemiskinan, menghilangkan ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat daya saing ekonomi kaum *musthaz'afin/the lower level of community* serta menciptakan ruang perekonomian yang adil. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Bait al-Mal dan Bait at-Tamwil. Bait al Maal adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan (non profit oriented). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (mustahik. Zakat, sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern. Sedangkan Bait at-Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (profit oriented). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah. BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar sector UMKM dengagn pihak Bank Syariah. Hal ini di karenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani UMKM menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah tengah masyarakat kecil atau pedesaan.

Koperasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu, *co-operation*” (*co*=bersama; *operation* = usaha). Koperasi berarti usaha bersama. Usaha bersama yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan bersama, untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/1X/2004. Tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Keuangan Syariah (KJKS) sebagai payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT, Koperasi Syariah, Koperasi Pondok Pesantren atau lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya yang beroperasi secara syariah. Koperasi dalam *fiqh* Islam dikenal dengan *Syirkah/Al-Syirkah* yaitu suatu perserikatan/perkongasian. Adapun dari segi istilah, koperasi adalah akad antara orang-orang untuk berserikat moda dan keuntungan.

C. M-Banking

Mobile banking merupakan jenis layanan yang fleksibel, karena bisa digunakan untuk membantu nasabah melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Dengan *mobile banking*, nasabah tidak perlu lagi ke ATM ataupun ke bank untuk melakukan transaksi perbankan seperti mentransfer uang, cek saldo, ataupun pembayaran tagihan-tagihan (kecuali penarikan uang tunai. *Mobile banking* adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melalui jaringan *internet*. Definisi lain mengatakan,

mobile banking adalah salah satu bagian dari *e-banking* yang merupakan layanan informasi perbankan via *wireless* paling baru yang ditawarkan pihak bank dengan menggunakan teknologi *handphone* untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan. *M-Banking* kini hampir di mana-mana di dunia, termasuk Indonesia. Melalui *M-Banking*, bank mencoba untuk menyederhanakan akses kliennya dalam melakukan transaksi perbankan. Hampir semua bank di Indonesia telah menyediakan fasilitas *M-Banking*, baik SIM toolkit (*Menu Service Data*) maupun *plain SMS* (*SMS Manual*) yang biasa dikenal dengan *SMS banking*.

Kegunaan, dan manfaat kenyamanan yang dapat diperoleh dari penggunaan *mobile banking*, adalah: A. Mudah: Untuk melakukan transaksi perbankan kita tidak perlu datang langsung ke bank, kecuali ketika mendaftarkan nomor telepon. B. Praktis: Setiap pelanggan dapat langsung bertransaksi setiap perbankan melalui waktu ponsel, kapan saja dan di mana saja. C. Aman: *M-banking* dilengkapi dengan sistem perlindungan maksimum yang pendaftaran otomatis telah diprogram sejak itu. Selain menggunakan pin dapat dipilih sendiri dan nomor ponsel yang terdaftar, transaksi apa pun juga diacak untuk memastikan keamanan pelanggannya. D. *User friendly*: *M-banking* dirancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan oleh siapa saja, pelanggan dapat memilih jenis transaksi dari menu yang telah tersedia tanpa harus menghafal kode transaksi yang harus dilakukan. E. Nyaman: Pelanggan menyukai memiliki ATM di telapak tangan, karena berbagai transaksi umum di ATM sekarang dapat dilakukan melalui *m-banking*.

Kebutuhan nasabah yang semakin banyak merupakan akibat dari kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi yang diikuti kecanggihan teknologi. Dukungan dan perkembangan Teknologi Informasi (TI) menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank, salah satunya yaitu *mobile banking* yang memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi secara *on-line*, tanpa harus mengunjungi bank tempat mereka menjadi nasabah. *Mobile banking* memberikan keuntungan bagi nasabah maupun bank. Bagi nasabah, *Mobile banking* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungan dari menyediakan layanan *mobile banking* bagi bank adalah *mobile banking* bisa menjadi solusi murah pengembangan infrastruktur dibanding membuka *outlet* ATM. Dengan kelebihan *mobile banking* dan pertumbuhan *internet* yang semakin cepat, diharapkan *mobile banking* menjadi kebutuhan hidup dalam masa depan yang berupa layanan transaksi perbankan yang mengutamakan mobilitas yang tinggi dan kepuasan pelanggan.

Manfaat penerapan *mobile banking* terhadap industri perbankan menurut USWeb (2000) terdiri atas :

- a. Meningkatkan kepuasan nasabah
- b. Mendapatkan dan mempertahankan nasabah
- c. Memperluas jangkauan geografis
- d. Penjualan silang
- e. Mengidentifikasi nasabah potensial
- f. Mengurangi biaya operasional

Manajemen resiko dalam penyelenggaraan kegiatan *internet banking*. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan *internet banking* adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui *Internet (Internet banking)*. Pengendalian pengamanan (*security control*) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui *internet banking*. Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (*non repudiation*) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi *internet banking*. Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem *internet banking*, database dan aplikasi lainnya. Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (*privileges*) yang tepat terhadap sistem *internet banking*, database dan aplikasi lainnya. Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi *internet banking*. Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (*audit trail*) yang jelas untuk seluruh transaksi *internet banking*. Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada *internet banking*. Langkah tersebut harus sesuai dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database. Manajemen Resiko Hukum dan Risiko Reputasi.

Bank harus memastikan bahwa *website* bank menyediakan informasi yang memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum bank sebelum melakukan transaksi melalui *internet banking*. Bank harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan bank menyediakan produk dan jasa *internet banking*. Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa *internet banking*. Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk mengelola, mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan (*internal* dan *eksternal*) yang dapat menghambat penyediaan sistem dan jasa *internet banking*. Dalam hal sistem penyelenggaraan *internet banking* dilakukan oleh pihak ketiga (*outsourcing*), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan *due dilligence* yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini ditujukan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bogor. Populasi dalam penelitian ini adalah staf akuntansi yang bekerja pada usaha kecil yang menggunakan jasa lembaga keuangan mikro

syariah. Jumlah sampel penelitian adalah 30 staf akuntansi yang bekerja pada UMKM. Responden penelitian diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 17 pertanyaan terkait pengetahuan mereka apakah sistem informasi akuntansi pada UMKM yang mendapatkan layanan keuangan dari LKMS berbasis *m-banking* berdampak terhadap laporan keuangan UMKM. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden

Responden berjumlah 30 orang staff akuntansi yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Berdasarkan masa kerjanya maka 10 orang mempunyai masa kerja kurang atau sama dengan satu tahun, 8 orang memiliki masa kerja 1 tahun, sedangkan 12 orang memiliki masa kerja lebih atau sama dengan dua tahun.

Tabel 1 deskripsi responden berdasar jender dan masa kerja

Jenis Kelamin	Pengalaman Bekerja			Total
	< = 1 tahun	1-2 tahun	>= 2tahun	
Laki-laki	3	5	7	15
Perempuan	7	3	5	15
Total	10	8	12	30

B. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi oleh UMKM

Untuk mengetahui seberapa manfaat teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi, maka para responden diminta untuk memberikan jawaban terhadap jenis transaksi yang digunakan.

Tabel 2 Tujuan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Oleh Responden

No	Sistem Informasi Akuntansi	STS	TS	N	S	SS	Jumlah
1	SIA dapat menentukan keputusan untuk melakukan pembelian	0	2	3	10	15	30
2	SIA dapat menentukan keputusan untuk melakukan piutang	0	13	2	8	7	30
3	SIA membantu pelaporan untuk transaksi kas	4	5	1	7	13	30
4	SIA dapat menentukan keputusan untuk melakukan pemesanan	0	3	3	10	14	30
5	SIA membantu pelaporan untuk transaksi hutang	0	7	4	10	9	30

6	SIA membantu untuk memutuskan biaya gaji karyawan	0	5	2	12	11	30
	Jumlah	4	35	15	57	69	180
	Presentase	2,2%	19,5%	8,3%	31,7%	38,3%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemanfaatan pada sistem informasi akuntansi yang ditujukan kepada responden menunjukkan di posisi sangat setuju sebesar 38,3%, setuju sebesar 31,7%, tidak setuju 19,5%, tidak berpendapat atau netral sebesar 8,3% dan sangat tidak setuju, yaitu 2.2%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pembelian online, mencatat transaksi piutang, kas, hutang, menerima pesanan dari pelanggan serta untuk mencatat sistem penggajian. Berdasarkan hasil pada table 2 maka dapat disimpulkan bahwa responden sudah familiar dengan penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi. Selanjutnya responden diminta untuk menilai sejauh mana dampak dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Hasil dapat dilihat pada table 3 berikut.

Tabel 3 Persepsi atas kemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi bagi UMKM

No	Aktivitas Sistem Informasi Akuntansi	STS	TS	N	S	SS	Jumlah
1	Buruknya kinerja keuangan perusahaan disebabkan oleh pemanfaatan SIA yang tidak tepat	3	2	10	7	8	30
2	Buruknya sistem informasi jaringan menyebabkan penurunan laba	4	4	5	5	12	30
3	Kurangnya keahlian staf tentang pemanfaatan SIA	0	3	4	8	15	30
4	Semua Aktivitas operasional mempunyai data base yang baik	0	8	7	8	7	30
5	Sistem keamanan komputer sangat baik	0	8	5	7	10	30
	Jumlah	7	25	31	35	52	150
	Presentase	4,7%	16,7%	20,7%	23,3%	34,6%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Persepsi atas kemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi bagi UMKM yang ada di Kabupaten Bogor menunjukan posisi sangat setuju sebesar 34,6%, setuju sebesar 23,3%, Netral sebesar 20,7%, tidak setuju sebesar 16,7%, dan sangat tidak setuju sebesar 4,7%. Mayoritas responden sangat setuju bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi bermanfaat bagi UMKM dalam pelaporan keuangan dan berdampak kepada kinerja keuangan perusahaan.

C. Persepsi Kemanfaatan *m-banking*

Fasilitas mobile banking memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus terhalangi oleh jarak dan waktu. Lembaga keuangan mikro syariah perlu menjamin kerahasiaan data nasabah untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan rekening nasabah. Fasilitas mobile banking memiliki sistem keamanan yang cukup ketat melalui verifikasi identitas nasabah sebelum dapat menggunakan jasa layanan *m-banking*. Urgensi untuk mencapai ekonomi efisiensi dan penghematan biaya untuk tujuan meningkatkan daya saing jangka panjang dan keberlanjutan, telah menciptakan permintaan yang tinggi untuk penggunaan sistem pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik menyajikan otomatisasi hutang, piutang, dan akibatnya mengurangi juga menghilangkan biaya yang kertas dan tenaga kerja, dan juga potensi kesalahan dalam pengolahan.

Tabel 4 Persepsi Kemanfaatan *m-banking*

No	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi melalui <i>m-banking</i>	STS	TS	N	S	SS	Jumlah
1	Keputusan pembelian menggunakan <i>m-banking</i>	5	2	5	8	10	30
2	Memanfaatkan <i>m-banking</i> untuk informasi piutang	7	5	3	8	7	30
3	Transaksi kas dilihat dari laporan <i>m-banking</i>	1	9	3	8	9	30
4	Pembayaran pemesanan memanfaatkan <i>m-banking</i>	2	3	2	7	16	30
5	Pembayaran Hutang menggunakan <i>m-banking</i>	5	5	5	7	8	30
6	Pemberian Gaji menggunakan fasilitas <i>m-banking</i>	0	13	1	10	6	30
	Jumlah	20	37	19	48	56	180
	Presentase	11,1%	20,5%	10,6%	26,7%	31,1%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap kemanfaatan *mobile banking* menunjukan di posisi sangat setuju sebesar 31,1%, setuju sebesar

26,7%, tidak setuju sebesar 20,5%, sangat tidak setuju sebesar 11,1%, dan netral sebesar 10,6%.

D. *Mobile banking* dan Sistem Informasi Akuntansi LKS

Lembaga keuangan syariah harus merencanakan untuk memastikan penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif yang berpotensi untuk membentuk dan mempengaruhi strategi organisasi mereka. Setelah mengalami fase pertumbuhan yang cukup signifikan, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) diharapkan mampu meningkatkan kecanggihan mereka dalam penggunaan ICT. LKMS harus menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan strategi TIK untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada klien dan mempertahankan keberlanjutan mereka. Setelah memiliki sistem informasi yang andal, LKMS akan mampu membentuk strategi dalam melakukan praktek bisnis yang baik dan membuat upaya jujur untuk layanan kepada orang miskin yang membutuhkan pinjaman dari LKMS (Kauffman dan Riggins, 2012; Weber, 2012, Malina Amran et al, 2013).

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berdampak terhadap kinerja keuangan UMKM. *Mobile banking* merupakan mekanisme yang tepat untuk pengurangan biaya dan peningkatan fleksibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan *m-banking* untuk melakukan pembelian online, mencatat transaksi piutang, kas, hutang, menerima pesanan dari pelanggan serta untuk mencatat sistem penggajian untuk efisiensi kinerja UMKM. LKMS juga seringkali berhadapan dengan resiko pembiayaan bermasalah sehingga harus menerapkan prinsip prudent (hati-hati) karena pembiayaan ini tanpa agunan dan bersifat social. Pemanfaatan *m-banking* meskipun memberikan manfaat yang sangat besar, tetapi juga memiliki resiko berupa tindakan kejahatan pembobolan sistem melalui cyber crime.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhuda CIBE (2013) Islamic Microfinance - A Hope for Poor. Available at: <http://www.alhudacibe.com/imfc2013/summary.php> on December 2013.
- Ismail, D. H. Z. (2013). Paving the Way to Inclusive Growth. Asian Link, Asian Institute of Finance, 12–14.
- Kaleem, A., and Ahmed, S. (2009). The Quran and poverty alleviation: A theoretical model for charity-based Islamic Microfinance Institutions (MFIs). Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39, 409–428.
- Kauffman, R. J., and Riggins, F. J. (2012). Information and communication technology and the sustainability of microfinance. Electronic Commerce Research and Applications, 11, 450–468.

Khaled, A. (2006). Until they change themselves, Available at: <http://www.daraltarjama.com/dt/library/pdf/Amr%20Khaled%20%20Islamic%20concepts%20-%20Until%20they%20change%20themselves.pdf> on December 2013)

Khaled, A. (2013). Qur'anic Reflections~Insights into the objectives of the Qur'anic verses. In Part 3/3 Qur'anic Reflections, 18, 104. Koenig

Mobile Banking Pilot Initiative For Microfinance Services Provincial Economic, Turban, E., King, D., and Wang, J. (2003). Introduction to e-commerce (p. 537). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017

Euis Amalia, *keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan peran LKM dan OMK di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2009

Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta UII Press, 2004

Afifa Malina Amran, et.al., "The current practice of Islamic microfinance institutions' accounting information system via the implementation of mobile banking". *Procedia-social and behavioral Sciences*. 145 (2014

Jeric. L. H. P. Langelo, Merinda Pandowo, "Factors driving the use of mobile banking at PT. Bank Central Asia (TBK) Manado". Vol. 2 No.1 Maret 2014

I Cenik dan Hendro, *Sisem Informasi Akuntansi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016

Judhistia P.J Baramuli, Herman Karamoy "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada P.T Ciputra Internasional Manado.

Jogiyanto, *Analisa dan Desain Sistem Informasi*, 2005

Rusdi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA)", *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung* Vol 49, No 125 (2011)

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-informasi-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 15.00

Bambang, Maghfiroh, *Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Elektronik pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Portal Garuda

Hendri Tanjung, Abrista Devi, 2013, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramata Publishing.